



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM  
MENERIMA  
AUDIENSI KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA),  
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA)  
DAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (SP)  
RABU, 21 MARET 2018**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Audiensi
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 21 Maret 2018
Waktu	: Pukul 12.55 WIB – 13.30 WIB
Tempat	: Ruang Kerja Waki Ketua DPR RI/Korpolkam Gedung Nusantara III DPR RI lt. 3
Acara	: Menerima Audiensi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) dan Solidaritas Perempuan (SP)
Pimpinan Pertemuan	: Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. ( Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)
Sekretaris	: Isnu Purwanto, S.I.P., M.M. Kabag Set.Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
Hadir	: Kiara, KPA dan SP <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tuti Rosinta</li><li>2. Kolier</li><li>3. Yendi</li><li>4. Supelly</li><li>5. Topan</li><li>6. M. Soleh</li><li>7. Zakir</li></ol>

**A. Pendahuluan**

Pada hari Rabu, 21 Maret 2018 pukul 12.55 WIB Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., menerima Audiensi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) dan Solidaritas Perempuan (SP).

## B. Pokok-Pokok Pembicaraan

1. Masih harus adanya perbaikan terhadap dalam RUU Pertanahan, karena masih belum melingkupi Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
2. RUU Pertanahan ini masih kurang menjamin hak perempuan dalam mengkaitkan/melibatkan pengawasan hak milik karena merujuk ke-3 (tiga) Undang-undang yang meliputi UU No. 27 Tahun 2007 Junto UU No. 1 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2016 dan UU No. 32 Tahun 2002 disalah satu Undang-undang masih kurang spesifik dalam penjelasan Wilayah Pesisir.
3. Ada 4 (empat) Hak yang harus diperhatikan dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang No.27 Tahun 2007 meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian SDM. Tetapi yang terjadi pada tahun 2017 ada 659 kasus di seluruh wilayah Indonesia.
4. Ingin mendukung Undang-undang tentang Pertanahan ke semua Fraksi-fraksi agar permasalahan bisa diajukan kepada Presiden untuk membantu menyelesaikan kasus yang terjadi saat ini.
5. Konsentrasi Serikat Perempuan dalam menyikapi RUU Pertanahan untuk meminta Hak Kesetaraan dalam Pertanahan karena adanya ketimpangan Hak milik dalam data Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri perempuan hanya memiliki 15% dari keseluruhan data yang terkumpul.

## C. Penutup

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa RUU Pertanahan sudah menjadi Prolegnas, ini sudah menjadi Prioritas dan harusnya selesai pada tahun 2018.
2. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyatakan bahwa yang harusnya dimiliki oleh setiap perorangan dalam mengelola pertanahan hanya 2 Hektar akan tetapi ada beberapa orang yang hingga puluhan Hektar dimiliki.
3. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan agar membuat dokumen atau *paper* supaya bisa diteruskan kepada pihak yang terkait.
4. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan terhambatnya Undang-undang ini akibat adanya pergantian Menteri yang sebelumnya Ferry Mursyidan digantikan Sofyan Djalil sehingga penyelesaian RUU Pertanahan menjadi *slow down* karena masih ada banyak pertimbangan masyarakat yang sudah mempunyai sertifikat tanah tidak mau diganggu gugat dalam RUU Pertanahan ini.

Audiensi ditutup pukul 13.30 WIB.

a.n. Ketua Rapat,  
Sekretaris Rapat



Isnu Purwanto, S.I.P., M.M.  
NIP. 19620313 198203 1 001